

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM KASUS WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PDT.G/2020/PN Mme)

Oleh

AKBAR RAYHAN NUGROHO

Kasus wanprestasi dalam perjanjian asuransi masih banyak terjadi, salah satunya sebagaimana terlihat dalam sengketa antara ahli waris almarhum Chrisantus Winata dengan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere, di mana perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sebagaimana tercantum dalam Polis Nomor 2004355080. Kasus tersebut mengangkat tiga permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang polis yang mengalami wanprestasi, pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak berdasarkan putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematika data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta perlindungan represif melalui mekanisme gugatan wanprestasi ke pengadilan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere telah melakukan wanprestasi, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum bagi Penggugat adalah hak Penggugat dikembalikan, yaitu menerima pembayaran klaim asuransi sesuai polis tersebut, sedangkan bagi Tergugat wajib membayarkan ganti kerugian atas klaim asuransi dari pihak Penggugat serta membayar biaya perkara sesuai dengan putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Asuransi.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION POLICY FOR HOLDER IN CASE OF INSURANCE COMPANY DEFAULT

(Study Of District Court Number 41/PDT.G/2020/PN Mme)

BY

AKBAR RAYHAN NUGROHO

Cases of default in insurance contracts are still common, as seen in the dispute between the heirs of the late Chrisantus Winata and PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Maumere, where the insurance company failed to fulfill its obligation to pay compensation as stipulated in Policy Number 2004355080. This issue raises three main questions in this study is legal protection provided to policyholders experiencing default, the judge's considerations in deciding the default case in Decision Number 41/PDT.G/2020/PN Mme, and the legal consequences for the parties based on this decision.

The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive approach. This study applies a statute approach. The data used in this study comes from secondary sources obtained through literature review and document analysis. The data processing method is carried out through examination, reconstruction, and systematic data analysis. Furthermore, the collected data is analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that legal protection for policyholders can be provided through two mechanisms, namely preventive protection through Law No. 40 of 2014 concerning Insurance, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, as well as repressive protection through a default lawsuit mechanism to the court. The judge's consideration in this case stated that PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Maumere Branch had committed a default, this act was a violation of Article 1238 in conjunction with Article 1243 of the Civil Code. The legal consequences for the Plaintiff were the Plaintiff's rights were returned, namely receiving insurance claim payments according to the policy, while the Defendant was obliged to pay compensation for insurance claims from the Plaintiff and pay court costs according to the court's decision.

Keywords: Legal Protection, Default, Insurance.